



Visitting Lecture PPKn FKIP UNS

*Citizenship Studies: Concept,
Issue, and Implementation :*

“Reorientasi & Rekonstruksi Kurikulum :
Substansi & Konsep Kewarganegaraan”

MACHMUD AL RASYID

Mantan Staff Pengajar Prodi PPKn FKIP –UNS

Surakarta, Sabtu 14 Pebruari 2026

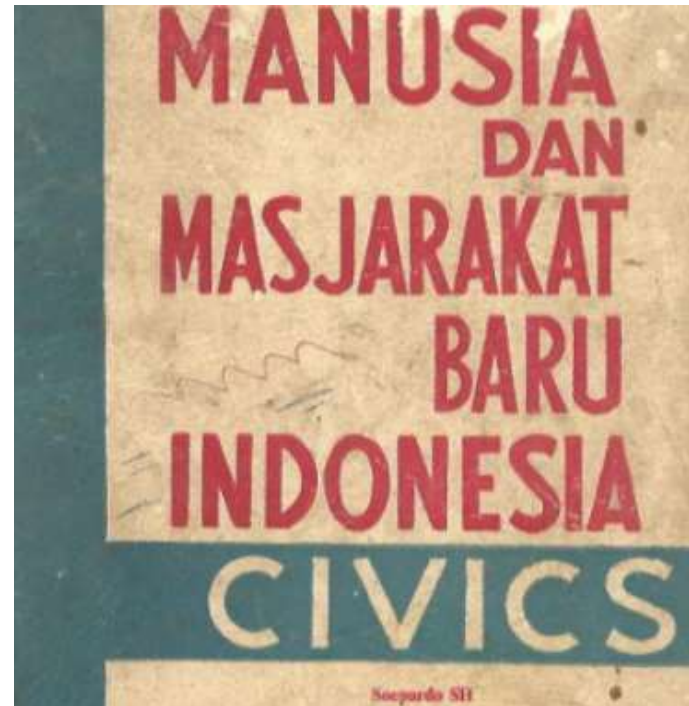
AGENDA

SEJARAH PENDIDIKAN GURU
PP/PPKn

FENOMENA
KEWARGANEGARAAN

KAJIAN REFERENSI

KESIMPULAN

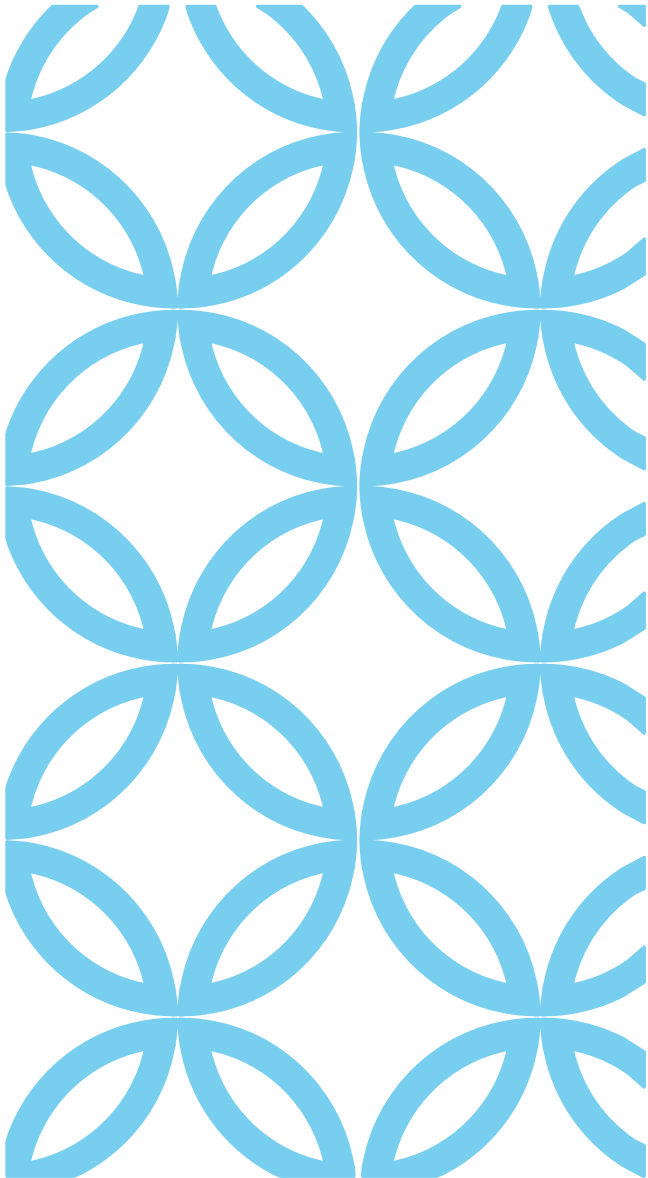




A. SEJARAH PENDIDIKAN GURU PP/PPKN

Tahun 1945 -1949 - Guru Sekolah Dasar (SD) : SGC (tidak jadi dibuka karena ada keberatan dari PGRI yang mesthinya 4 tahun), SGB (Tingkat SMP), dan SGA (Lulusan SGB atau SMP)

Tahun 1950 – 1965 – Dipecahnya Kementrian PP dan K 1957 menjadi Departemen Pendidikan Dasar & Kebudayaan (PDK) dan Departemen Pendidikan Tinggi & Ilmu Pengetahuan (PTIP)



Oktober 1954 di dirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) untuk menjadi Guru Sekolah Menengah, yaitu PTPG Malang (Merger ke UNAIR), PTPG Bandung (ke UNPAD), PTPG Batusangkar (ke UNAND), PTPG Tondano (ke UNHAS)

Terkait dengan “Pemakai/Konsumen” (PDK) dan “Penghasil/ Produksi” (PTIP) maka dimunculkan pula Institut Pendidikan Guru (IPG) sebagai pembeda dari PTPG

CATATAN SELA STUDI CIVICS

Sebagai jalan pintas diselenggarakan Kursus B-I, B-II dan PGSLP & PGSLA yang bertugas menyiapkan guru-guru untuk sekolah lanjutan.

PTPG – 20 Oktober 1954 Prodi Ekonomi dan Hukum Negara
Dimana waktu itu nama Mapel Adalah Tata Negara

25 Nopember 1958 berdiri Universitas Padjadjaran dan bergabung/digabung menjadi FKIP

Berlaku Mapel CIVICS sehingga perlu dibentuk Guru CIVICS oleh Prodi EKONOMI dan HUKUM NEGARA yang kemudian berubah menjadi CIVIC & Hukum (dengan Pemisahan Program Studi Ekonomi dan Program Studi Civics-Hukum)

Disebut Civics
(Kewarganegaraan)

1957–
1962

1968

Berubah nama
menjadi Pendidikan
Kewarganegaraan.

Berubah menjadi
Pendidikan Moral
Pancasila (PMP).

1975–
1994

1994

Sekarang: Menjadi
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
(PPKn) hingga
Kurikulum Merdeka.

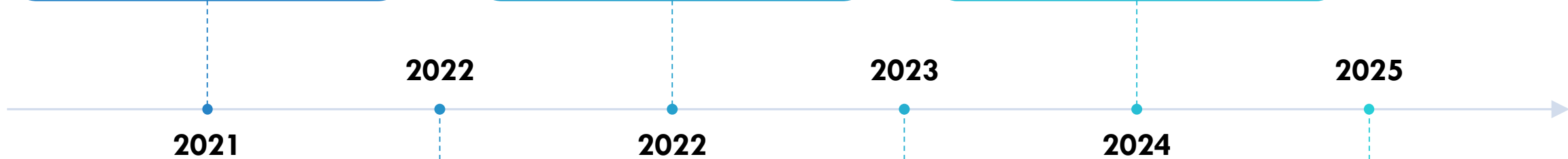
disebut Kurikulum
Penggerak tetapi
populer Kurikulum
Merdeka

2021

No.028/2021 (9 Juli 2021) Kurikulum Penggerak dan masih disebut PPKN

No.033/2022 (7 Juni 2022) Kurikulum Merdeka dan disebut Pendidikan Pancasila

No.032/2024 (11 Juni 2024) - sda

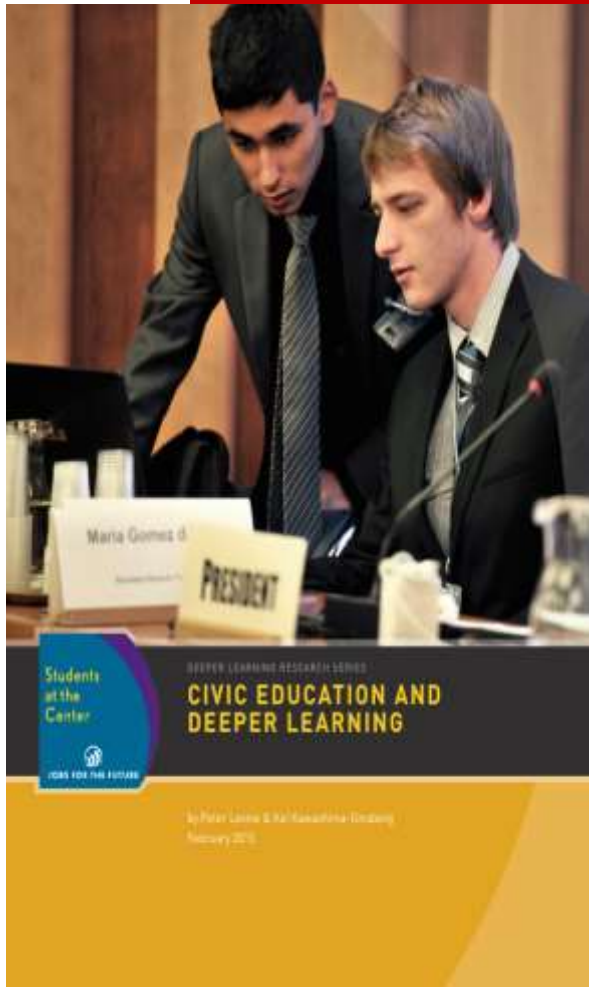


No.008/2022 (15 Pebruari 2022) Kurikulum Merdeka dan disebut Pendidikan Pancasila

No.033/2023 (18 Agustus 2023) –sda Sudah bersama BPIP

No.046/2025 (16 Juli 2025) – sda ditambah Pembelajaran Mendalam (Berkesadaran, Menggembirakan, Literasi Dasar)

DEEP LEARNING CITIZENSHIP



Hewlett Foundation	Alliance for Excellent Education	KESIMPULAN
1. Master core academic content	A. Know and master core academic content	1. Menguasai konten akademis inti
2. Think critically and solve complex problems	B. Think critically and solve complex Problems	2. Berpikir kritis dan memecahkan masalah yang kompleks
3. Work collaboratively	C. Work collaboratively	3. Bekerja sama
4. Communicate effectively	D. Communicate effectively; and	4. Berkomunikasi secara efektif
5. Learn how to learn	E. Be self-directed and able to incorporate feedback	5. Belajar cara belajar (mengarahkan diri sendiri)
6. Develop academic mindsets		6. Mengembangkan pola pikir akademis (mampu memasukkan umpan balik)

KESIMPULAN : PEMBELAJARAN MENDALAM KONTEKS SPESIFIK MAPEL



Penerapan pembelajaran yang lebih mendalam pada kewarganegaraan dan integrasi kewarganegaraan dalam pembelajaran yang lebih mendalam. Penekanan pembelajaran yang lebih mendalam pada pengembangan antarpribadi dan intrapersonal tampaknya sangat sejalan dengan minat jangka panjang pendidik kewarganegaraan dalam menumbuhkan pengembangan warga negara yang aktif dan terlibat.



Kedua gerakan tersebut berupaya mengembangkan pemuda sebagai orang yang tidak hanya memahami cara kerja sistem politik dan hukum kita, tetapi juga diperlengkapi untuk bergabung dengan sesama warga negara dalam perdebatan yang bertanggung jawab dan penuh rasa hormat, untuk merenungkan dan merevisi posisi mereka sendiri, untuk bernegosiasi dan bekerja melalui konflik yang pelik, dan akhirnya untuk mengatasi masalah lokal dan nasional.....



Pembelajaran kewarganegaraan membutuhkan pendekatan baru yang melibatkan pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih kolaboratif, yang memanfaatkan teknologi canggih dengan lebih baik, yang dinilai dengan cara yang lebih autentik, dan yang meresap ke dalam kurikulum.

KONTEKSNYA DENGAN RUANG LINGKUP & ELEMEN

CIVICS

PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA

PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (Butir-Butir Pancasila)

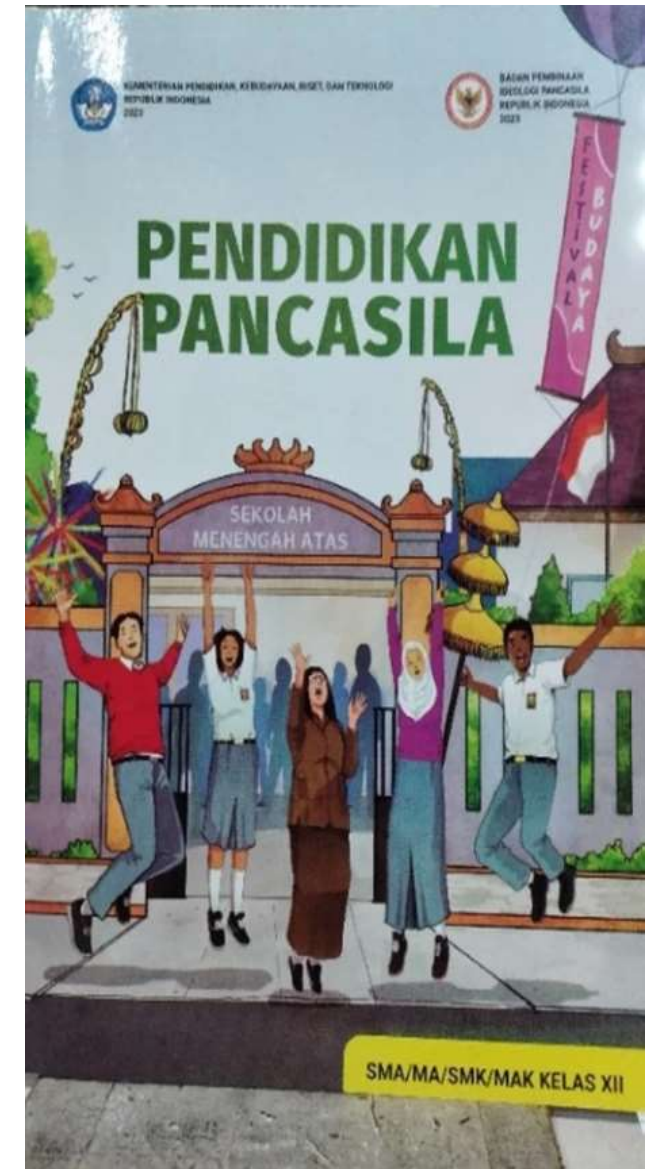
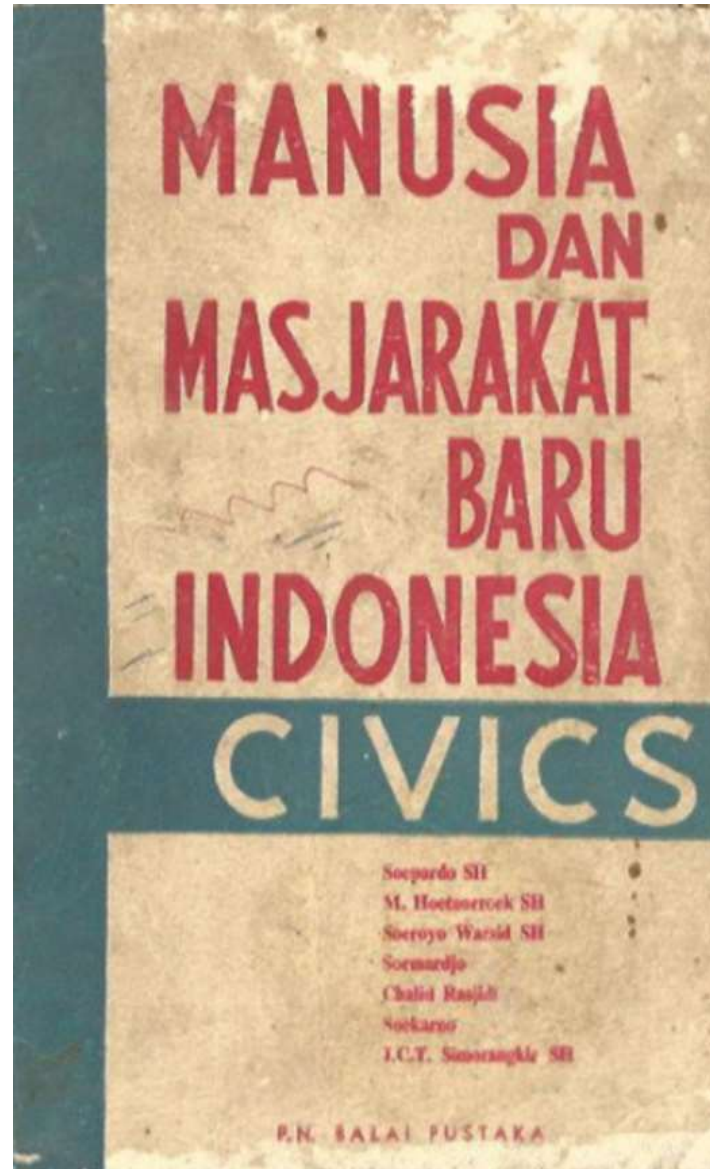
KEWARGANEGARAAN (KBK - 8 Standar Pancasila & Konstitusi digabung dan ditambah Masyarakat Demokrasi)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (KTSP – 8 Standar Isi – Sama ttp Masyarakat Demokrasi Hilang, Pancasila & Konstitusi dipisah))

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (4 Ruang Lingkup)

PENDIDIKAN PANCASILA (4 Elemen)

BUKU
“KEWARGANEGARAAN”
DI INDONESIA PERTAMA
& 2023



KURIKULUM 046/2025 :

Rasional : ...Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang berisi muatan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk murid menjadi warga negara yang cerdas, amanah, jujur, berbudi luhur dan bertanggung jawab.

Karakteristik :....5. mengembangkan praktik belajar kewarganegaraan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. FENOMENA KEWARGANEGARAAN

B.1. Anak Kelas IV SD butuh uang untuk beli BUKU dan Pena tidak bisa karena ibunya tidak punya uang – Bunuh diri. Program pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako). Lainnya Program Indonesia Pintar (PIP), PBI JKN (kesehatan gratis), BLT Dana Desa, dan Makan Bergizi Gratis. Najwa di Kendari 8 tahun jualan Tisu tertabrak Alat Berat hanya untuk mendapatkan beras untuk makan, karena yang dirumah sudah tidak ada, dan yang ada disiapkan untuk adiknya.

B.2. Pada sisi lain ada BOS di Sekolah di bawah Kemendikdasmen & Kemenag, SR di Kemensos, maupun SMA Garuda Kemendikisaintek

B.3. Beda lagi untuk Pendidikan Tinggi, perbandingan antara Pendidikan Tinggi Kemendikisaintek dan Kemenag lebih rendah daripada Pendidikan di Kementrian Teknis lain (Dalam struktur APBN 2024, PTKL mendapat dana Rp 32,859 triliun. Sedangkan anggaran untuk PTN hanya dialokasikan Rp 7 triliun. Dengan jumlah Rp 7 triliun itu, Kemendikbud mesti membagi untuk lebih dari 100 kampus negeri dengan jumlah mahasiswa yang jauh lebih banyak ketimbang PTKL. Tempo.co)

B.4. Lebih tragis lagi di depan dan di kita, Adanya Penerimaan mahasiswa Baru "Mandiri" yang tidak pernah secara terbuka dibuka nilai dan "sumbangan" nya, Dimana apa mungkin calon mhsw yang belum bekerja dapat membayar sumbangan ?. Tentu penghasilan orang tua atau kemampuan orangtua untuk membayar sumbangan. Bagaimana mungkin yang akan kuliah adalah calon mhsw yang diukur kemampuan keuangan orang tua. Maka jelas

B.5. Meritokrasi Pegawai Pemerintah yang sudah dimulai dengan test CPNS yang terbuka, dengan layar di depan ruang-ruang ujian tentang kemampuan si calon, sehingga walaupun kualitas soal mungkin sebagai assessment masih ada kelemahan, tetapi setidaknya bisa menjadi tolok ukur nasional. Kasus yang muncul istilah P₁, P₂ dan seterusnya, kemudian muncul P₃K yang dikelola daerah, kasus Honorer.....yang semuanya menuntut perlakuan yang sama dengan PNS....

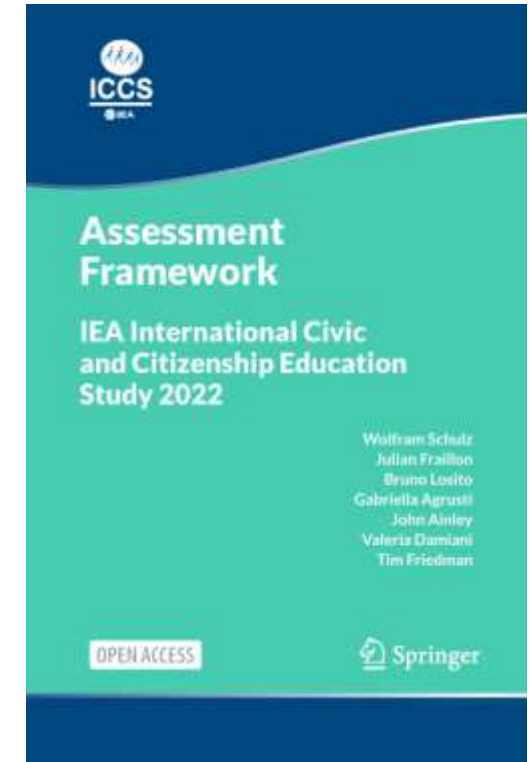
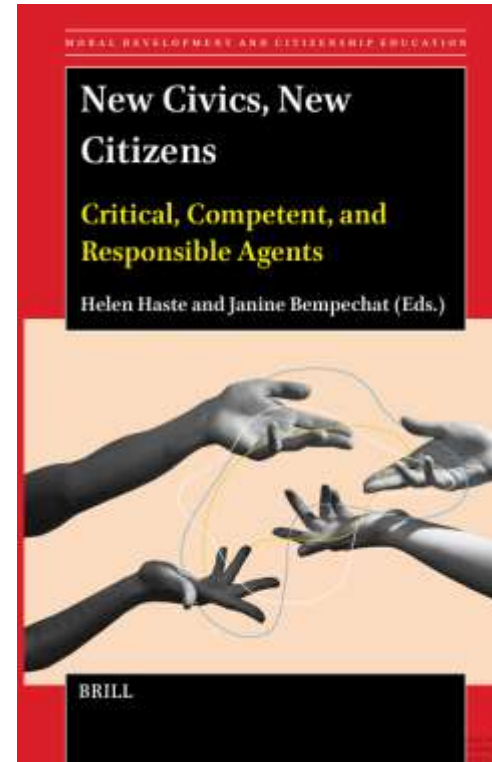
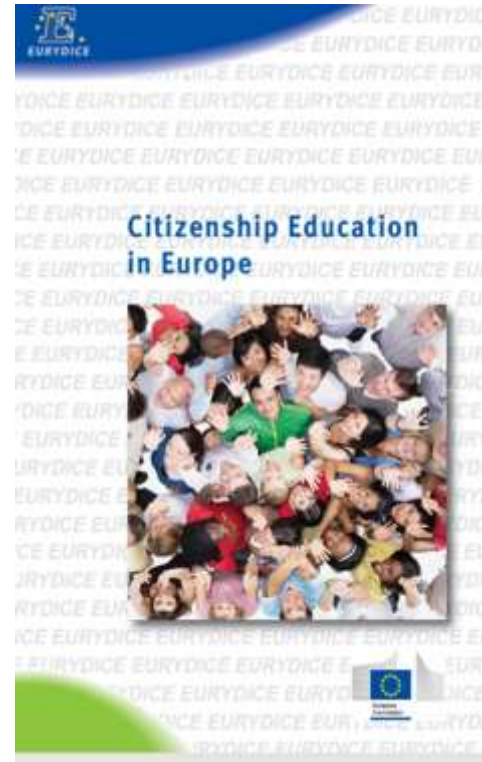
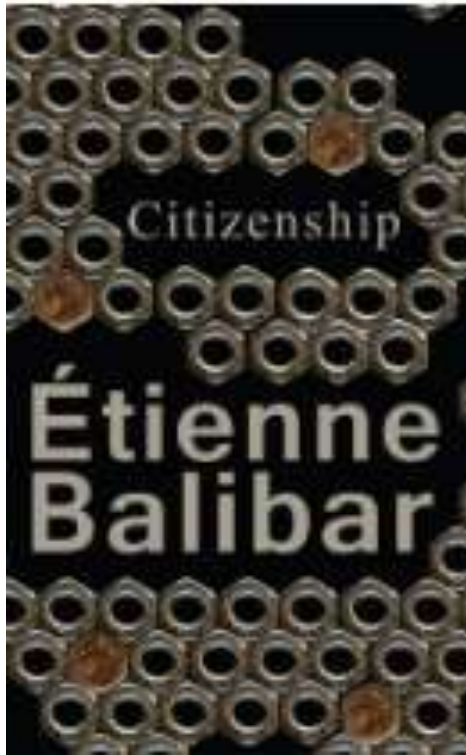
B.6. Kasus MK : Hakim Aswanto diganti Guntur Hamzah, Wahidudin Halim diganti Asrul Sani, dan Arief Hidayat diganti Inosentius Samsul yang dicabut dan diganti Adies Kadir. Kedudukan Hakim dibawah DPR, Hakim dibawah Presiden, Hakim dibawah MA Dimana penggantian tergantung lembaga pengusul, padahal ada eksekutif (Presiden K/LP), legislative (DPR & DPD), dan Yudikatif (MA & MK).

Atas dasar hal tersebut, maka pemahaman tentang Citizen, Civics, Citizenship, maupun Civic and Citizenship Education perlu dilakukan. Pada sisi lain sudah berkembang dengan CITIZEN SCIENCE, MARKET CITIZENSHIP, AGONISTIC CITIZENSHIP, dan istilah berbeda lainnya.



NAMA-NAMA MATA KULIAH KONTEKS KEWARGANEGARAAN

1. Ilmu Kewarganegaraan
2. Konsep Dasar Kewarganegaraan
3. Hukum Kewarganegaraan
4. Politik Kewarganegaraan
5. Kewarganegaraan Multikultural
6. Ekonomi Kewarganegaraan
7. Kewarganegaraan Lingkungan



C. KAJIAN REFERENSI : CIVICS, CITIZENSHIP, CIVIC & CITIZENSHIP EDUCATION, DLL

Handbook of
**Citizenship
Studies**



Edited by
Engin F Isin & Bryan S Turner

SAGE

EDITED BY
AYELET
SHACHAR
RAINER
BAUBÖCK
IRENE
BLOEMRAAD
MAARTEN
VINK

The Oxford Handbook of
CITIZENSHIP

Hannah Soong
Editors

The Palgrave
Handbook of
Citizenship
and Education

The SAGE Handbook of
Education for Citizenship
and Democracy



KEWARGANEGARAAN - CITIZENSHIP

CIVICS

- Konsep
- Theory of Civics

CITIZENSHIP

- Konsep
- Theory of Citizenship

CIVICS & CITIZENSHIP EDUCATION

- Konsep
- Theory of Civics & Citizenship Education

KOMPONEN CITIZENSHIP : POLITICS OF CITIZENSHIP: TOWARDS AN ANALYTICAL FRAMEWORK HAS ORIGINALLY BEEN PUBLISHED IN THE NORWEGIAN JOURNAL OF GEOGRAPHY (2017, VOLUME 71, ISSUE 4)

DIMENSION CITIZENSHIP

Membership (+ Identity)

Legal Status (Legal Dimension,
Political Dimension, Social
Dimensions)

Right (Civil, Political, Social,
Cultural and Group Right)

Participation (James A.Banks;
Cohen & Uphoff)

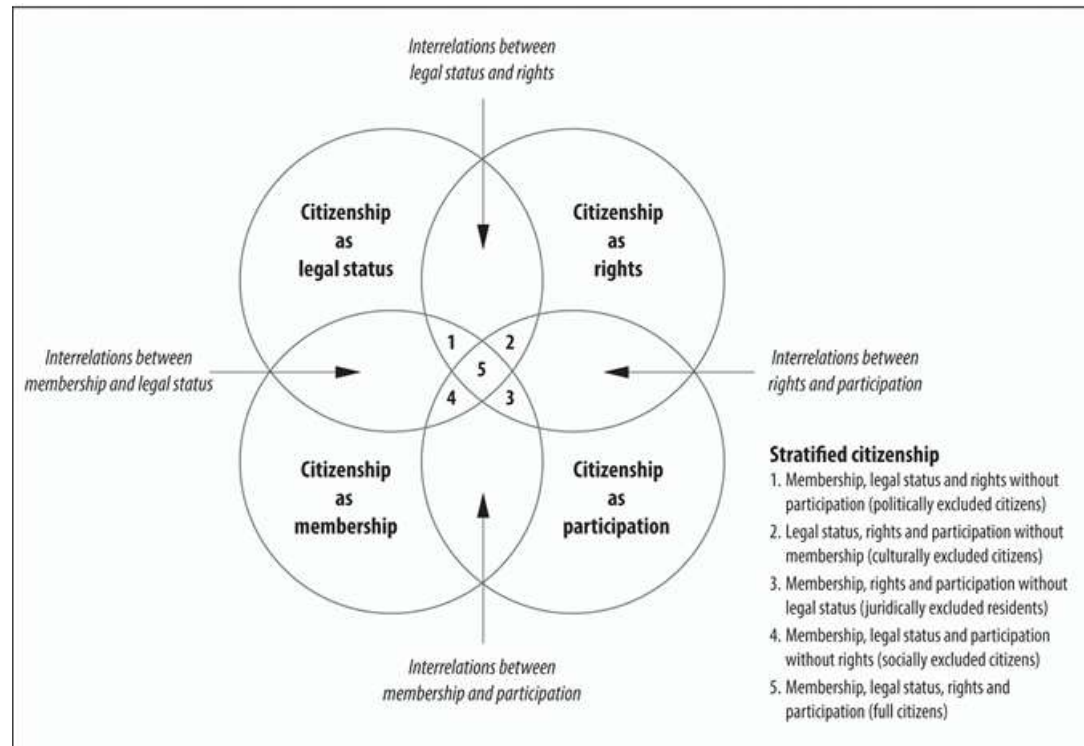


Figure 1. Dimensions and stratification of citizenship

VEERA ILONA IJJA DALAM ARTIKELNYA AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF CITIZENSHIP: LEGAL, POLITICAL AND SOCIAL DIMENSIONS MENDESKRIPSIKAN CITIZENSHIP AS STATUS DIKATAKAN :

Legal Dimension

Political Dimension

Social Dimension

James A. Banks : Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age (2008) & Failed Citizenship and Transformative Civic Education (2017)

Differentiating levels of citizenship

Legal citizenship

Minimal citizenship

Active citizenship

Transformative citizenship

James A. Banks : & Failed Citizenship and Transformative Civic Education (2017)

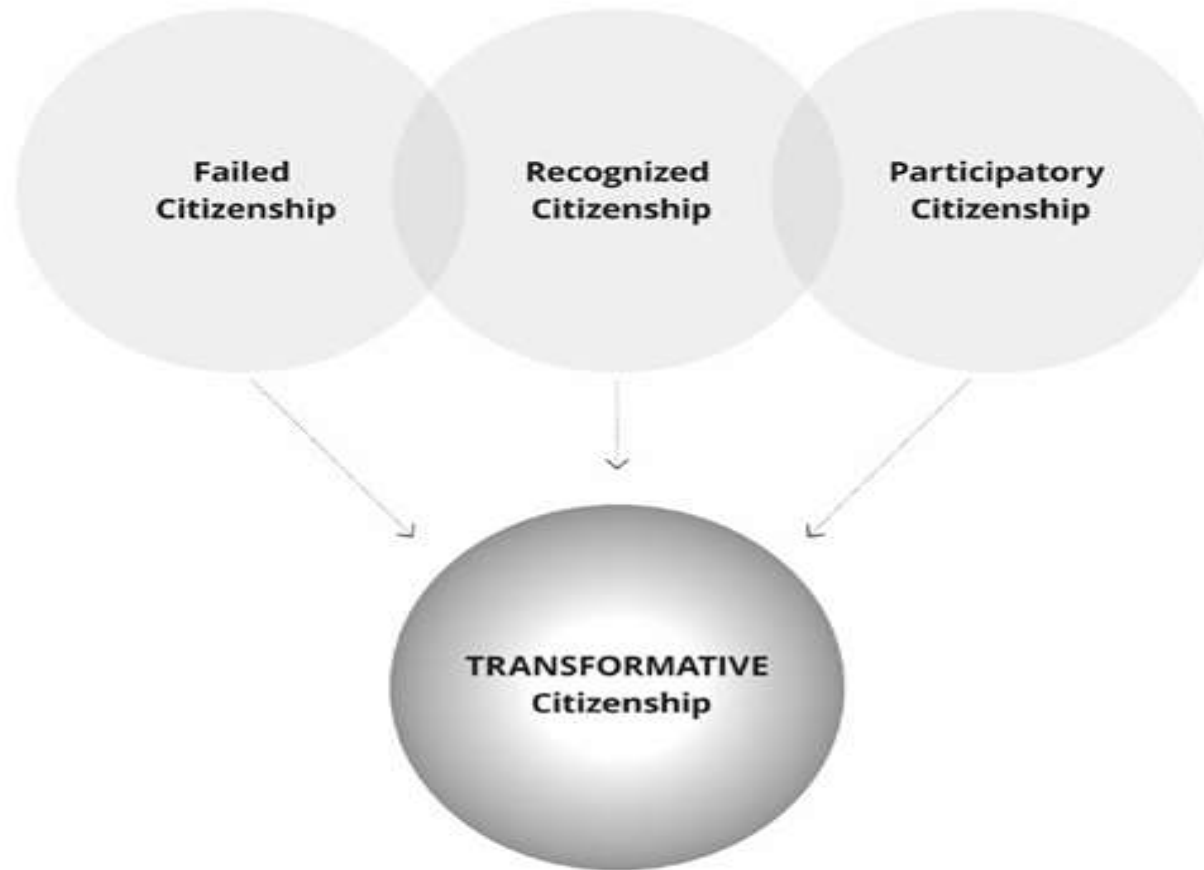


FIGURE 1. *The interrelationship of the types of citizenship*

This figure illustrates how the typology of citizenship described in this article is a fluid and complex concept. The four categories of citizenship are interrelated rather than discrete and distinct.

BERDASARKAN KRISTIAN STOKKE
(DILANJUTKAN) : BAHWA KESEMUA
STATUS ATAU DIMENSI, HARUS
DIPERJUANGKAN (PRAKTEKNYA)
BACA “CITIZENSHIP DI INDONESIA:
PERJUANGAN ATAS HAK,
IDENTITAS, DAN PARTISIPASI” BY
WARD BERENSCHOT & GERRY VAN
KLINKEN

PERJUANGAN

HAK

IDENTITAS

PARTISIPASI

Perjuangan pada Bentuk Ketidak-adilan & Politik Ketidak-adilan (Fraser 2009, Fraser & Olson, 2008) :

Bentuk Ketidak-adilan	Politik Keadilan	Penyelesaiann Ketidak-adilan	
		Afirmasi	Transformasi
Maldistribusi	Politik Redistribusi	Negara Kesejahteraan Liberal	Sosialisme
Mis-Rekognisi (Tidak ada Pengakuan)	Politik Pengakuan	Multikulturalisme	Dekonstruksi
Mis-Representasi	Politik Representasi	Representasi Proporsional	Demokrasi Substantif

PERKEMBANGAN KONSEP CIVICS :

Civic Responsibility

Civic Engagement

Civic Virtue

Civic Commitment

Civic Confidance

Civic Belonging

Civic Participation, Civic Solidarity, Civic Duty/Obligation,
DLL

CIVIC & CITIZENSHIP EDUCATION

Civic & Citizenship Education
(Pendidikan Kewarganegaraan)

Program Pembelajaran Khusus Melalui Kurikulum Sekolah (Sempit)

Program Pendidikan Kewarganegaraan di luar Sekolah (LUAS)

KOMPONEN CIVIC & CITIZENSHIP EDUCATION

Civics

- Sebagaimana dinyatakan di atas

Citizenship

- Sebagaimana dinyatakan di atas

Mengikuti
Perkembangan Sesuai
Tujuan & fungsi

- Kesiapan untuk hidup di masa depan
- Eksistensi dalam turbulensi negara & dunia

KOMPONEN CIVIC & CITIZENSHIP (PERKEMBANGAN INTERNASIONAL)

ICCS - IEA

- International Civic and Citizenship Education Study 2009, 2016, 2022
- International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

CITIZED

- Project CITIZED – Empowerment Citizenship Education EU 2021
- Teachers Competence Framework And Self-Assesment Tools

DII Ahli & Organisasi

IEA – ICCS 2009 – 2022

THE FOUR CONTENT DOMAINS ARE:

The four content domains are IEA-ICCS

I. Civic institutions and systems

II. Civic principles

III. Civic participation

IV. Civic roles and identities



I. CIVIC INSTITUTIONS AND SYSTEMS



A. State institutions



B. Economic systems



C. Civil society



II. CIVIC PRINCIPLES



A. Equity



B. Freedom



C. Rule of law



D. Sustainability



E. Solidarity



III. CIVIC PARTICIPATION



A. Decision-making



B. Influencing



C. Community participation



IV. CIVIC ROLES AND IDENTITIES



A. Citizens



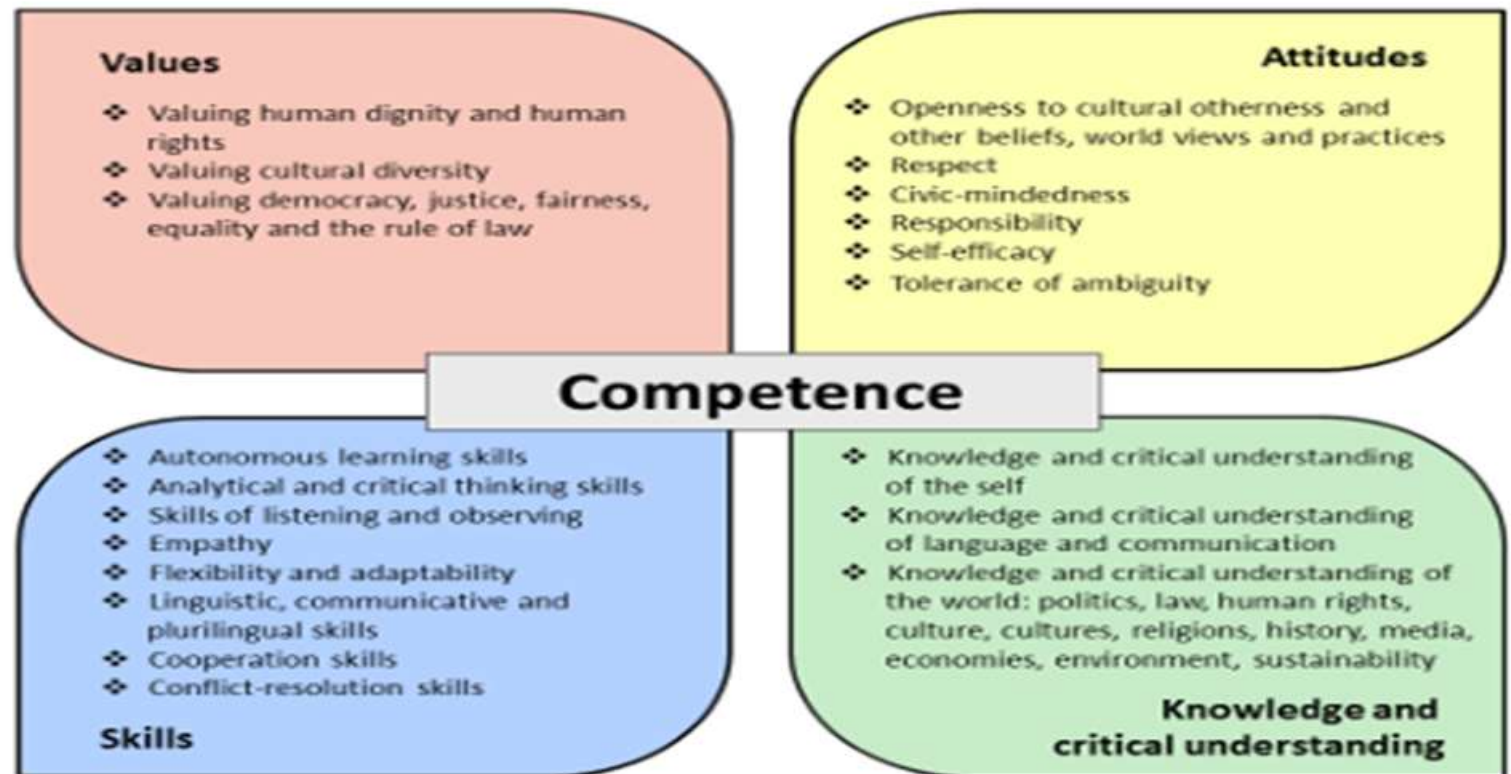
B. Civic self-image



C. Civic connectedness

INGUASAAN KONTEN INTI AKADEMIK (CITIZED 2021)

PROJECT CITIZED –
EMPOWERMENT
CITIZENSHIP EDUCATION
EU 2021
TEACHERS COMPETENCE
FRAMEWORK AND SELF-
ASSESSMENT TOOLS



KNOWLEDGE & CRITICAL UNDERSTANDING (3)

- ◆ 1. KNOWLEDGE AND CRITICAL UNDERSTANDING OF THE SELF
- ◆ 2. KNOWLEDGE AND CRITICAL UNDERSTANDING OF LANGUAGE AND COMMUNICATION
- ◆ 3. KNOWLEDGE AND CRITICAL UNDERSTANDING OF THE WORLD : POLITIC, LAW, HUMAN RIGHT, CULTURE, CULTURES, RELEGION, HISTORY, MEDIA, ECONOMIES, ENVIRONMENT, SUSTAINABLITY



SKILLS (8)

- ◆ 4. AUTONOMOUS LEARNING SKILLS
- ◆ 5. ANALYTICAL AND CRITICAL THINKING SKILLS
- ◆ 6. SKILLS OF LISTENING AND OBSERVING
- ◆ 7. EMPATHY
- ◆ 8. FLEXIBILITY AND ADAPTILITY
- ◆ 9. LINGUISTIC, COMMUNICATIVE AND PLURILINGUAL SKILLS
- ◆ 10. COOPERATION SKILLS
- ◆ 11. CONFLICT AND RESOLUTION SKILLS





VALUES (3)

12. VALUING HUMAN DIGNITY AND HUMAN RIGHTS

13. VALUING CULTURAL DIVERSITY

14. VALUING DEMOCRACY, JUSTICE, FAIRNESS,
EQUALITY AND THE RULE OF LAW



ATTITUDES (6)

15. OPENNESS TO CULTURAL OTHERNESS AND
OTHER BELIEFS, WORLD VIEWS AND PRACTICES

16. RESPECT

17. CIVICS MINDEDNESS

18. RESPONSIBILITY

19. SELF-EFFICACY

20. TOLERANCE OF AMBIGUITY

TEACHERS COMPETENCE FRAMEWORK AND SELF-ASSESSMENT TOOLS – CIVITED 2021

The Model is Visually Represented with a Butterfly with four wings
Which Represent :

A. Values

B. Skills

C. Attitudes

D. Knowledge and Critical Understanding

DESCRIPTOR - EXAMPLES

- ◆ • **Values - Valuing cultural diversity:** Promotes the view that we should be tolerant of the different beliefs that are held by others in society
- ◆ • **Attitudes - Openness to cultural otherness and to other beliefs, world views and practices:** Expresses a willingness to relate to others who are perceived to be different from himself/herself
- ◆ • **Analytical and critical thinking skills:** Can make connections between arguments and information
- ◆ • **Knowledge and critical understanding of language and communication:** Can describe some effects which different styles of language use can have in social and working situations



3. Helen Haste, Angela Bermudez and Mario Carretero, Culture and Civic Competence; Widening the Scope of the Civic Domain, in “Civics and Citizenship Theoretical Models and Experiences in Latin America” by Benilde García-Cabrero (Eds.) 2017: 3-14

THE COMPONENTS OF CIVIC COMPETENCE

Civic Knowledge and Understanding

Civic Skills

Civic Values, Motivation, and Identity

Civic Action

Perlu Penekunan terhadap Konsep :

Teori Kewarganegaraan

Civics

Citizenship

Civic &
Citizenship
Education

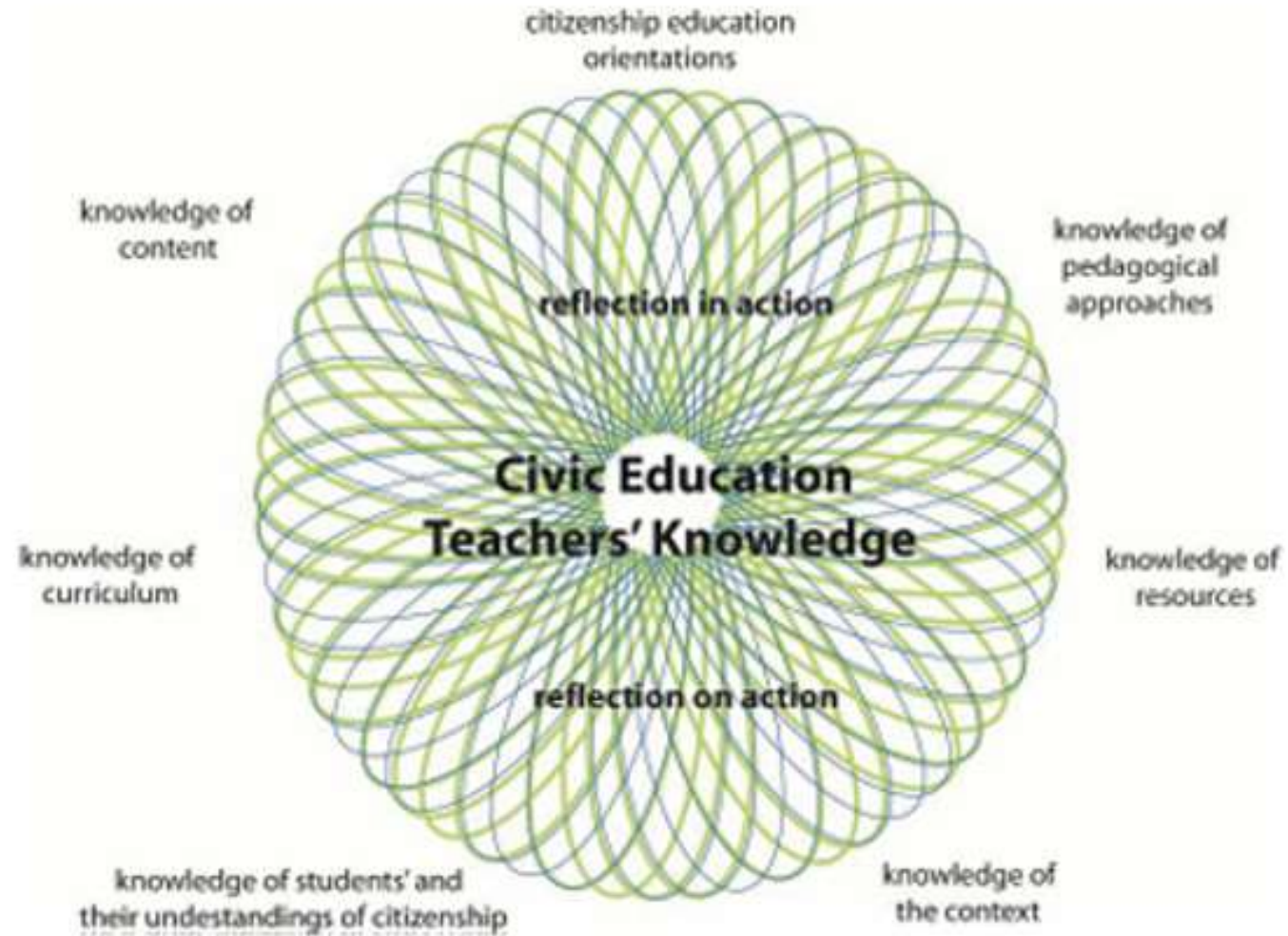


Figure 1 – Civic Education Teachers' Knowledge framework

SEKEDAR CATATAN TENTANG PEMBENTUKAN GURU MAPEL :

Dalam rangka pemenuhan guru, pemerintah pada periode 1950-1959 melakukan beberapa upaya, diantaranya pembentukan Sekolah Guru (SG), kursus-kursus keguruan, dan lembaga pendidikan guru.

Sekolah guru yang didirikan, antara lain SGB (Sekolah Guru Bawah) lama pendidikan 4 tahun; SGA lama pendidikan 3 tahun dan SGC lama pendidikan 1,5 tahun. Dan kursus keguruan yang didirikan, antara lain Kursus Lisan Persamaan SGB (KLPSGB/KLPSGA) lama pendidikan 4 dan 2 tahun; dan Rukun Belajar Persamaan SGB/SGA (RBB/RBA).

Pemerintah juga mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) sebagai lembaga tinggi yang menghasilkan guru.

Langkah awal yang diambil oleh pemerintah Orde Baru ialah dengan melebur SGB dan SGA menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru) yang bertahan sampai dengan tahun 1990/91. Untuk menggenjot pertumbuhan guru, pada 1970-an pemerintah Orde Baru memberikan perizinan untuk mendirikan berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).



Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus

Mereka dilaknat karena durhaka dan melampaui batas

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat



**KATA AKHIR :
MERUJUK QS AL MAIDAH (5:78-90)**